

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR PADA MASA KRISIS¹ (SUATU PEMIKIRAN ALTERNATIF)

Raldi Hendro Koestoer
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

ABSTRACT

The crisis has overwhelmed most urban area in Southeast Asian Region, including Indonesia. Since mid- 1997, Indonesia has experienced a significant turmoil in economy due to the crisis. Most major urban areas were badly influenced. The development of economic sector was mostly collapsed. As a consequence, the employment problems occur. Because of the limitation access to economic development, the government took a consideration to boost a rescue program, i.e. Social Safety Net (SSN) program.

Coastal urban community was the most vulnerable group that was affected by the impact of crisis. When the economic condition has reduced they hardly found the job. Most of them were job-looser and laid-off. They could not find any better alternative way to get access to employment, but the coastal resource. Some attempted to find any resources along the coast that can be utilized for income earnings. Because of their limitations of knowledge in utilizing the coastal resources, the activities might damage the coastal environment. Meanwhile, the SSN Program was launched to public, but the coastal urban community could not get easily access to the program. In this context, there would be some room for environmental scholars and scientists to contribute their capacity to assist the urban coastal community to get access to employment.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan. Pada dimensi positif, lingkungan dan sumberdaya alam wilayah pesisir di perkotaan, terutama Jakarta, dapat dieksploitasi untuk menghasilkan devisa baik bagi nasional maupun regional, maka bukan tidak mungkin Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberi penekanan bagi pemanfaatan ruang di sekitar wilayah pesisir. Namun perlakuan kebijaksanaan lokal ini dapat menjadi 'misleading' terhadap penerapan kegiatan

yang berlangsung di wilayah yang bersangkutan yang berakibat pada situasi negatif lebih lanjut.

Pada kenyataannya, penerapan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ini banyak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang pada mulanya banyak bergantung pada kehidupan alam sekitar wilayah pesisir yang berpotensi tersebut. Nelayan yang dalam keseharian hidupnya masa lampau mencari nafkah dari ketersediaan lingkungan alam yang ada. Tetapi pada masa kini, jumlah proporsi mere-

1. Makalah dipresentasikan pada Pertemuan Pakar Dalam Pengelolaan Dampak Kota Besar Terhadap Perairan di depannya, 7-8 April 1999, Kerjasama antara Puslitbang Oseanologi-LIPI dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Jakarta

ka semakin menurun dan cenderung hilang; mereka tidak dapat lagi memanfaatkan alam secara optimal karena kondisi yang tidak lagi memungkinkan. Terlebih lagi, kondisi lingkungan alam sudah sangat berubah sebagai akibat dari kebijaksanaan pembangunan yang diberlakukan oleh Pemda, untuk kepentingan pemasukan pendapatan regional Jakarta.

Penurunan kualitas lingkungan wilayah pesisir sudah tampak semakin nyata. Indikasi yang jelas dapat ditunjukkan dengan hilangnya kesempatan hidup bagi pemulihan hutan mangrove, di mana potensi biota laut yang hidup di lingkungan kawasan hutan bakau tidak dapat dipertahankan lagi. Kehidupan alam sehat di lingkungan wilayah pesisir banyak diganggu oleh deposit sampah sebagai hasil buangan rumah tangga. Kondisi diperparah dengan kebijaksanaan pembangunan Pantura melalui reklamasi pantai, yang sangat mengganggu habitat lingkungan wilayah pesisir.

Sementara, dalam perjalanan masa pembangunan, Indonesia mengalami gejolak dan gangguan krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas terhadap aktivitas pembangunan ekonomi. Namun, dibalik kondisi tersebut muncul suatu 'berkah' yang bermanfaat terhadap penurunan aktivitas pengembangan wilayah Pantura. Secara ekonomis, nilai kualitas lingkungan wilayah pesisir menurun drastis, di mana potensi lingkungan yang pada mulanya dapat menarik para wisnu (wisatawan nusantara) dan wisman (wisatawan mancanegara) dan sangat strategis bagi Pemda, tetapi pada saat ini tidak lagi berpotensi demikian; menurut Kompas (1999: 2) diketahui bahwa jumlah wisatawan menurun secara tajam; padahal wilayah pesisir Indonesia biasanya dikenal sangat menarik bagi pemasukan devisa negara di sektor pariwisata.

Tidak lepas dari situasi krisis, Pemerintah berupaya membangun kembali pertumbuhan ekonomi beserta pemerataan pembangunan melalui program 'crash' Jaring Pengaman Sosial. Pada intinya kebutuhan pembangunan saat ini adalah dorongan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Makalah ini ingin mengulas kemungkinan pemulihan wilayah pesisir dengan memanfaatkan program JPS melalui pember-

dayaan masyarakat bagi kepentingan perlindungan lingkungan setempat.

KOTA DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK

Sukar untuk mendefinisikan istilah kota, tetapi upaya untuk memberikan pengertian yang umum dapat menghantar pada pemahaman terhadap arti lingkungan kota. Branch (1995) menyebutkan bahwa perkotaan memiliki sejumlah besar penduduk yang tinggal pada kantong-kantong pemukiman dan memiliki strata tahapan tertentu yang mengandung evolusi sosial masyarakat. Koestoer (1997) memberikan pengertian yang mendasar, khususnya bagi kota di Indonesia, yaitu berasal dari suatu tatanan desa yang berkembang secara kompleks dan spasial menjadi kota. Secara implisit, perubahan tatanan yang mendasar terjadi pada struktur sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Secara horisontal kota Jakarta berkembang mulai dari wilayah pesisir. Perkembangan secara spasial kota Jakarta mengikuti arah ke Selatan, Barat dan Timur. Ke arah Selatan kota Jakarta, perkembangan dinamisnya mulai pada sekitar tahun 1970an, sementara perkembangan ke arah Timur dan Barat puncak perkembangannya sekitar pertengahan tahun 1980an. Pada abad 17-19, perkembangan pemukiman dari wilayah pesisir ke arah selatan ditandai dengan kantong-kantong tempat tinggal yang sekarang dikenal sebagai wilayah Pecinan (Abeyasekere, 1989). Akumulasi penduduk sudah mulai tampak sejak saat itu dan Jakarta mulai dibanjiri oleh kelompok pendatang atau migran dari berbagai tempat, yang menjadikan kota Jakarta multi-etnis dan cenderung menjadi kosmopolit. Para pendatang bermukim secara turun menurun dan membuka usaha tidak jauh dari tempat bermukimnya. Bayang-bayang kesempatan yang tersedia di Jakarta menjadikan impian dan daya tarik kelompok migran untuk pindah ke wilayah perkotaan.

Jakarta saat ini menjadi kota terbesar dan terpadat di Indonesia. Kalau ditinjau dari sisi kapasitas daya dukung kota, maka Jakarta pada masa menjelang tahun 2000 ini sudah tidak dapat menampung jumlah penduduk

yang besar. Menurut informasi Sensus tahun 1961 dan 1971 dicatat bahwa jumlah penduduk meningkat sekitar dua kali lipat, yaitu dari 2,7 juta orang menjadi 4,6 juta orang, lihat Tabel 1. Pada periode sensus berikutnya, yaitu tahun 1980 dan 1990, jumlah penduduk meningkat drastis dan demikian juga kepadatan penduduknya. Dengan kepadatan yang meningkat tentunya dapat diperkirakan terjadi kompetisi dalam kesempatan kerja dan lapangan usaha penduduk kota. Wilayah pesisir sudah dapat dipastikan merupakan bagian wilayah yang 'vulnerable' terhadap perubahan sebagai akibat dari desakan pembangunan kota Jakarta.

Tabel 1
Perkembangan Penduduk Jakarta

Tahun Sensus	Penduduk ('000org)	Kepadatan (Org/km ²)
1961	2.699	4.574
1971	4.576	7.755
1980	6.503	11.023
1990	8.220	13.932

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai terbitan

Berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk, perkembangan spatial kota belakangan ini menunjukkan kecenderungan pola berkebalikan. Pada tahun 1961-1971, kepadatan tinggi terutama memusat di wilayah utara dan tengah kota. Pada periode selanjutnya, pada tahun 1980-1990, pola pergeseran mulai tampak di mana pembengkakan wilayah 'urban fringe' mulai semakin nyata, sebaliknya kepadatan penduduk di wilayah pusat kota mulai berkurang. Hal ini sebagian mengilustrasikan adanya situasi penurunan proporsi jumlah penduduk wilayah pesisir sebagai akibat pembangunan fisik kota. Pergeseran pemukiman penduduk 'lama' di pusat dan pesisir kota Jakarta terjadi secara drastis dalam era pembangunan yang lalu.

Tentunya kondisi tersebut cenderung merubah pola sosial ekonomi penduduk wilayah pesisir. Karena terbatasnya wilayah garapan yang biasanya dapat dimanfaatkan untuk me-

ningkatkan pendapatan penduduk lokal, maka masyarakat nelayan menjadi semakin terdesak, dan bahkan banyak dari mereka sudah tidak lagi melaut. Proses perubahan dan pergeseran lapangan kerja ini termasuk bagian dari dampak sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat wilayah pesisir. Dengan kata lain, pembangunan fisik kota Jakarta mempengaruhi pola sosial masyarakat wilayah pesisir.

PERKEMBANGAN SITUASI EKONOMI KRISIS

Krisis ekonomi dimulai pada saat terjadinya krisis moneter dan ditandai dengan meningkatnya nilai tukar mata uang asing, khususnya dollar Amerika, terhadap rupiah pada bulan Juli 1997. Akibat yang ditimbulkannya tidak hanya ditandai dengan menurunnya kinerja perekonomian, tetapi juga pada aspek-aspek lain seperti meningkatnya harga barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran. Menurunnya kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1998 diperkirakan mencapai angka negatif 13,7%, sementara pada tahun-tahun sebelum krisis ekonomi laju pertumbuhan ekonomi nasional hampir selalui berada diatas 7%. Demikian juga dengan PHK dan penganggur pada tahun 1998 semakin meningkat. Paling tidak sekitar 150.000 orang pekerja telah kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran bertambah sebanyak sekitar 5 juta orang menurut data Sakernas (Survey Tenaga Kerja Nasional) tahun 1998.

Pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada tahun 1994. Dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,2% (tahun 1997 adalah 7,5%) menjadikan tahun ini sebagai tahun dengan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan sektor ini sangat berkaitan erat dengan usaha pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pada saat yang sama, proyek reklamasi Pantura

mulai diguncungkan di berbagai mass-media, yang tidak lain adalah untuk menarik penanam modal asing ke Indonesia. Di lain pihak pakar lingkungan pesisir secara intensif melakukan diskusi mendalam dan berkepanjangan yang pada intinya menghimbau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunda pelaksanaan reklamasi pantai tersebut.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1996, keadaan perekonomian Indonesia berjalan dengan sangat baik meskipun ada juga subsektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai, yaitu sebesar 7,82%. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu listrik, gas dan air (13,63%), bangunan (12,76%) dan industri pengolahan (11,59%). Berbeda dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 1996 sub-sektor industri migas tidak mengalami pertumbuhan negatif. Implikasi terhadap wilayah pesisir Jakarta adalah terjadinya peningkatan aktivitas kapal tanker, yang pada gilirannya 'oil spill' sangat memungkinkan terjadi. Penurunan kualitas lingkungan seperti ini dapat mengakibatkan dampak yang lebih luas, terutama terhadap kematian ikan-ikan yang biasa memiliki habitat di sekitar perairan teluk Jakarta.

Dampak krisis ekonomi tidak hanya mempengaruhi dunia usaha secara keseluruhan, tetapi juga yang lebih mendasar adalah dampak terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja, yaitu pengangguran dan berkurangnya kesempatan berusaha, terutama bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir. Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari dampak krisis ekonomi berasal dari, paling tidak, tiga aspek, yaitu PHK, penambahan angkatan kerja baru yang tidak terserap oleh pasar kerja dan penganggur lama yang sejak sebelum krisis ekonomi memang belum mendapatkan pekerjaan.

Jika dilihat penambahan penganggur menurut propinsi, yang sebagian besar tinggal di wilayah perkotaan, maka propinsi yang menerima penambahan penganggur besar adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki pertambahan proporsi penganggur masing-masing sebesar 9,59% dan 21,76%.

Sebagian besar dari total proporsi tersebut berada di wilayah JABOTABEK, hanya Kabupaten Bogor yang tidak memiliki wilayah pesisir. Hal ini dapat diperkirakan masyarakat wilayah pesisir pun mengalami situasi yang sulit sehubungan dengan masalah krisis ekonomi ini. Kondisi ini mengandung resiko yang lebih parah, di mana lapangan usaha sektor modern terbatas, sementara, bagi masyarakat pesisir potensi alam yang relatif tersedia adalah lingkungan pesisir.

Tanpa bermaksud pretensi terhadap aspek yang lebih buruk, dapat diperkirakan sasaran yang sangat 'vulnerable' untuk dimanfaatkan adalah lingkungan alam pesisir. Jadi dapat diantisipasi, situasi dampak ekonomi krisis mempengaruhi, selain terhadap masyarakat juga terhadap sumberdaya alam lingkungan pesisir.

Perpindahan atau pergeseran lapangan kerja yang terjadi dewasa ini dapat dikatakan sebagai proses perubahan sebagai akibat kegiatan pembangunan. Pergeseran jenis pekerjaan banyak disebabkan oleh kondisi faktor sumber daya ekonomi, seperti: pendapatan, upah, perdagangan. Faktor kebijaksanaan Pemerintah lebih cenderung pada kebijaksanaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti penyediaan fasilitas umum (pendidikan, rumah sakit, pasar, jalan).

Pada umumnya daerah yang mempunyai kemampuan *resource economics* yang lebih besar akan mempunyai kesempatan yang lebih pesat dibandingkan daerah yang relatif lebih terbatas *resource economics*-nya. Konsekuensi dari perbedaan perimbangan sumberdaya ekonomi antara suatu daerah dan lainnya akan menjadikan kesempatan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang berbeda secara nyata. Kondisi seperti ini sering menjadi daya tarik bagi tenaga kerja di wilayah pesisir dan sekitarnya untuk beralih pekerjaan ke kegiatan lain (sebagai contoh industri pengolahan dan jasa) yang dianggap lebih berkembang dan lebih menjanjikan. Dorongan tersebut dipercepat oleh kondisi sumberdaya wilayah pesisir wilayah perkotaan yang semakin terdesak oleh kegiatan industri dan jasa perkotaan.

Berkaitan dengan itu, akibat surplus pemanfaatan tenaga kerja pada tingkat tertentu mempunyai implikasi yang beragam bagi proses mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Di satu pihak, surplus tenaga kerja di suatu wilayah dan di lain pihak, kekurangan tenaga kerja di wilayah lain, yang stratanya lebih rendah tersebut biasanya digunakan sebagai fenomena logis terhadap dinamika proses mobilitas antar region sebagai pengaruh perbedaan daya tarik sumberdaya ekonomi. Terbukanya kesempatan kerja di sektor ekonomi di daerah perkotaan membawa dampak terhadap daya tarik kota tersebut bagi wilayah lain, termasuk wilayah pesisir. Migrasi seperti ini terjadi sebagian sebagai akibat dari adanya ketimpangan yang nyata terhadap pemanfaatan sumberdaya antara wilayah pesisir dan non-pesisir.

Kecenderungan dinamika pola mobilitas dapat diamati secara tidak langsung dari perkembangan pergeseran proporsi angkatan kerja. Menurut informasi Supas (Survey Penduduk Antar Sensus) antara tahun 1985-95, angkatan kerja di wilayah perkotaan meningkat dari 14,2 juta orang menjadi 29,2 juta orang; sementara di wilayah pesisir perkotaan relatif pergeserannya nyata. Jika ditinjau dari sisi jumlah pekerja, pada tahun 1985 tenaga kerja di wilayah perkotaan adalah sekitar 13,5 juta orang dan pada tahun 1995 adalah sekitar 25,9 juta orang. Ini berarti mengandung pertambahan jumlah penganggur yang nyata antara tahun 1985-1995. Menjelang pertengahan tahun 1997, terjadi pengaruh krisis yang dahsyat terhadap perekonomian nasional, sehingga mengakibatkan semakin terbatasnya kesempatan kerja.

Sebagian besar dari SDM masyarakat pesisir, baik angkatan kerja maupun pekerja, memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tamat sekolah dasar ke bawah. Sebagian besar dari mereka berharap dapat memasuki lapangan kerja di sektor modern, seperti: industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Tetapi untuk memasuki lapangan kerja seperti itu dibutuhkan keterampilan yang memadai. Secara logis, bagi mereka yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan seperti yang dibutuhkan oleh pasar kerja, cenderung menjadi penganggur. Itulah sebabnya, pada masa krisis setelah perte-

ngahan tahun 1997, kondisi akumulasi penganggur semakin meningkat, tidak dapat dihindari, termasuk pengangguran wiayah pesisir. Saat perekonomian dilanda krisis seperti yang terjadi ini, banyak terjadi penutupan kegiatan ekonomi sektor modern, seperti: konstruksi, industri dan jasa, dan melewatnya kegiatan ekonomi telah mengakibatkan dampak kehilangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Kondisi yang serba menyulitkan membawa masyarakat pesisir pada situasi yang pasrah dan terjepit, baik secara mental-fisik maupun sosial-ekonomi. Pada saat yang tepat pakar lingkungan baik lingkungan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang relevan guna memberi alternatif gagasan yang dapat membawa masyarakat keluar dari situasi krisis dan juga meningkatkan pemahaman perlindungan terhadap lingkungan alam sekitar pesisir.

Tabel 2 memberikan gambaran tentang penyebaran kelompok penganggur menurut propinsi. Tampak bahwa Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak banyak pemusatan penganggur dibanding dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ini dapat diinterpretasikan bahwa kondisi perekonomian yang sangat parah terjadi di KBI. Seperti diketahui bahwa kegiatan jasa dan industri di KBI merupakan tulang punggung kegiatan pembangunan, sementara kegiatan ekonomi wilayah pesisir seperti industri perikanan di KTI merupakan salah satu sektor kunci. Tidak lepas dari kondisi tersebut, bukan berarti bahwa wilayah pesisir di KBI tidak berpotensi, tetapi karena desakan 'driving force' kegiatan ekonomi di KBI lebih menitik-beratkan kegiatan ekonomi perkotaan seperti jasa dan perdagangan, maka banyak kawasan pesisir yang berpotensi ekonomi menjadi terabaikan. Dengan demikian orientasi penduduk wilayah pesisir, khususnya di wilayah perkotaan cenderung memilih aktivitas jasa. Pada saat krisis ekonomi melanda semua sektor ekonomi, maka aktivitas jasa menjadi sangat terpengaruh. Jika ditinjau lebih jauh, wilayah pesisir yang terabaikan menjadi salah satu alternatif bagi pengembangan ekonomi lokal. Namun karena pengelolaannya tidak memadai, seringkali perlakuan usaha di wilayah pesisir cenderung 'tidak berkelanjutan'.

KEBIJAKAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL

Sehubungan dengan kondisi krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, Pemerintah mengupayakan suatu kebijaksanaan terobosan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi lebih lanjut melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS memprioritaskan pada empat aspek pokok: (i) peningkatan ketahanan pangan, (ii) penciptaan lapangan kerja produktif, (iii) perlindungan sosial dan (iv) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam fokus pembahasan makalah ini, aspek penciptaan lapangan kerja produktif bagi lingkungan pesisir,

Tabel 2
Penambahan Jumlah Penganggur Akibat Krisis Menurut Propinsi Pada Tahun 1998

Propinsi	Jumlah Penanggur	
	(Orang)	(%)
1. D. I. Aceh	37.770	0,72
2. Sumatera Utara	374.980	7,18
3. Sumatera Barat	71.437	1,37
4. Riau	56.022	1,07
5. Jambi	42.280	0,81
6. Sumatera Selatan	165.036	3,16
7. Bengkulu	36.444	0,70
8. Lampung	101.656	1,95
9. DKI Jakarta	500.756	9,59
10. Jawa Barat	1.136.816	21,76
11. Jawa Tengah	1.149.960	22,02
12. DIY	110.114	2,12
13. Jawa Timur	957.336	18,33
14. Bali	59.160	1,13
15. NTB	41.632	0,80
16. NTT	10.414	0,20
17. Timor Timur	2.436	0,05
18. Kalimantan Barat	24.124	0,46
19. Kalimantan Tengah	89.198	1,71
20. Kalimantan Selatan	101.225	1,94
21. Kalimantan Timur	- 2.118	- 0,04
22. Sulawesi Utara	40.552	0,78
23. Sulawesi Tengah	- 1.225	- 0,02
24. Sulawesi Selatan	71.284	1,36
25. Sulawesi Tenggara	18.090	0,35
26. Maluku	32.120	0,61
27. Irian Jaya	- 4.321	- 0,08
Jumlah	5.223.218	100,00

Sumber : BPS, Sakernas 1998

baik lingkungan alam maupun manusia terutama penganggur, menjadi sangat relevan untuk didiskusikan.

Kebijaksanaan penciptaan lapangan kerja produktif (PLKP) dilaksanakan melalui program padat karya. Sebagai bagian dari program JPS, fokus kegiatannya terutama dimaksudkan muncul dari masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat. Upaya dalam pelaksanaan kegiatan program JPS ini dioperasionisasikan melalui sistem koordinasi yang ditujukan langsung untuk masyarakat yang rentan akibat krisis (Sumodiningrat, 1999: 5). Diasumsikan bahwa program JPS ini dapat membangkitkan kembali kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyak kritik muncul di mass-media terutama dalam kelancaran program JPS yang meragukan, tetapi belum banyak solusi yang dapat membantu kelancaran program pemerintah ini. Kesempatan ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh pakar lingkungan, khususnya lingkungan pesisir, untuk urun-rembug menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan jalan keluar (alternatif) pemecahan masalah atas dasar kaidah-kaidah keilmuan.

Sesuai dengan prioritasnya, tujuan program JPS padat karya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Program JPS padat karya yang bersifat langsung merupakan upaya menanggulangi dampak krisis seperti pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja produktif dalam jangka pendek; secara tidak langsung mendukung program peletakan arah kegiatan sosial-ekonomi produktif masyarakat sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN PESISIR

Masalah pengangguran dan pemulihan lingkungan alam menjadi fokus prioritas pembangunan kawasan pesisir. Secara bersamaan keduanya dapat diakomodasikan melalui program JPS padat karya. Namun dalam mengantisipasi pemecahan masalah tersebut dibu-

tuhkan suatu tahapan yang sistematis untuk menemukannya permasalahan yang mendasar. Karena persyaratan program JPS adalah dari, oleh dan untuk masyarakat, maka dibutuhkan informasi dari 'bawah', pada tingkat komunitas. Deteksi terhadap jumlah pengganggu dan alternatif pengembangan usaha perlu dilakukan pada tahap awal.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan membantu perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di wilayah pesisir potensi usaha pembudidayaan rumput laut dan biota laut lainnya, sebagai contoh, dapat menjadikan komoditi unggulan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Pemasokan komoditi untuk kebutuhan kelompok penggemar 'sea-food', yang biasanya berasal dari kelompok ekonomi yang lebih kuat, dapat diupayakan; sementara pemberdayaan masyarakat terhadap sistem budidaya yang ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapat masyarakat lokal di wilayah pesisir. Namun untuk menumbuhkembangkan daya tarik para nelayan pengganggu di wilayah ini dibutuhkan pendekatan sosialisasi terhadap komunitas setempat. Pengenalan sistem pengelolaan pembudidayaan dan pemasaran sederhana hasil olahan dapat disebarluaskan melalui pendekatan pengembangan komunitas. Pengenalan pemahaman terhadap komoditas hasil yang berasal dari lingkungan tempat tinggal di wilayah pesisir bagi masyarakat lokal memberi dorongan pengertian paradigma ramah lingkungan yang dapat diterapkan secara sederhana, selain juga dapat melindungi dan memelihara lingkungan wilayah pesisir. Semakin mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar dapat memberikan penghidupan dan nilai tambah bagi keluarganya, maka akan semakin percaya mereka terhadap program JPS yang penterjemahannya diramu menurut kaidah inovatif ramah lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program inovasi teknologi tepat guna bagi wilayah pesisir cenderung memberi solusi yang memadai. Pada saat program JPS padat karya diinformasikan pada masyarakat guna mengatasi pengangguran, banyak diantara para pengganggu di wilayah pesisir yang tidak

memahami apa yang harus dilakukan untuk dapat mengakses pada program tersebut dan bagaimana mengusulkan suatu kegiatan; singkatnya, masyarakat membutuhkan bimbingan yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga, tidak mustahil, di kalangan masyarakat muncul keraguan atas keberhasilan program yang bersangkutan yang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik sosial yang berpotensi muncul dalam setiap aktivitas induksi program JPS dapat secara sederhana dipecahkan melalui forum musyawarah masyarakat yang difasilitasi melalui para kader yang telah dipersiapkan oleh para peneliti lingkungan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui JPS padat karya yang diramu dengan induksi paradigma lingkungan pesisir yang inovatif cenderung memberikan solusi sesuai dengan kondisi lokal.

Kiat-kiat pemberdayaan masyarakat semacam ini dapat mulai dilakukan oleh pakar yang relevan. Pemberian informasi tentang aspek perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam sekitar merupakan pengetahuan yang mendasar terhadap sosialisasi aspek kesadaran masyarakat setempat yang bermanfaat bagi pembangunan yang berlanjut.

Setelah masyarakat memahami lingkungan wilayah pesisir sesuai dengan potensi alam sekitar tempat tinggalnya, alternatif pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja produktif dapat difasilitasi melalui program JPS yang berkait dengan sektor yang menanganinya pada strata yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui unit komunitas, masyarakat memiliki akses terhadap program tersebut, yang pada gilirannya 'software' yang berupa pemberdayaan fasilitator terhadap kegiatan rinci yang akan dikembangkan dapat mempercepat proses pemulihan pembangunan, termasuk pemulihan dan perlindungan lingkungan wilayah pesisir. Aktualisasi akses terhadap program pemulihan ekonomi yang didorong oleh pemerintah dapat dikemukakan tanpa menimbulkan konflik sosial, tetapi tetap mempertahankan kaidah pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Tentunya gagasan seperti ini masih bersifat sederhana. Pada tahapan operasional, dibutuhkan koordinasi yang lebih matang antar pakar guna mencipti-

takan penyempurnaan pendekatan yang lebih sesuai baik secara fisik, sosial maupun kebijakan.

RINGKASAN

Lingkungan wilayah pesisir laut Jakarta saat ini menghadapi situasi yang sangat terdesak, baik secara lingkungan fisik (biogeofisik) maupun sosial (sosial dan ekonomi). Secara biogeofisik ditunjukkan melalui kondisi lingkungan alam yang tidak sehat yang menjadikan kualitas lingkungan fisik dan akumulasi biota laut wilayah pesisir cenderung menurun. Pembangunan Pantai Utara Jakarta untuk kepentingan bisnis semata tampaknya perlu ditinjau kembali, karena secara nyata telah memberikan limitasi dan bahkan kehancuran, bagi kehidupan lingkungan biota, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan alam setempat. Ditinjau dari sisi lingkungan sosial, kehidupan masyarakat pesisir menjadi semakin terdesak, sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur fisik Jakarta dan juga tekanan ekonomi. Sementara Pembangunan wilayah Pantura belum banyak memberi harapan bagi masyarakat lokal setempat.

Situasi krisis yang ditandai oleh menurun drastisnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai dolar Amerika, cenderung memberi dampak yang lebih luas di berbagai sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa kemampuan daya serap tenaga kerja wilayah perkotaan Jakarta menjadi sangat menurun. Lebih jauh lagi, kondisi krisis secara mikro sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat pesisir. Masyarakat asli pesisir yang sebagian sudah tidak lagi melaut, cenderung mencari pekerjaan di sektor-sektor formal, tetapi kesempatan untuk masuk ke lapangan kerja formal saat krisis ini sudah semakin sempit. Kecenderungan yang sangat memungkinkan adalah mereka memanfaatkan lingkungan fisik wilayah pesisir secara tidak terkontrol dan seringkali berlebihan. Mungkin ke'bias'an ini bukan semata kesalahan dan kelalaian mereka tetapi seyogyanya ditinjau terhadap faktor penyebabnya, yaitu desakan kebutuhan hidup perkotaan Jakarta, khususnya di wilayah pesisir, terhadap kesempatan

hidup yang paling memungkinkan bagi masyarakat setempat.

Kelompok pendatang pencari kerja yang tinggal di wilayah pesisir pun telah memberikan beban bagi daya dukung lingkungan. Mereka cenderung menjadi penganggur dan pola kehidupan miskin melanda berbagai kawasan kumuh di wilayah pesisir. Pengangguran dan kemiskinan merupakan bagian utama dari dampak sosial ekonomi masyarakat setempat. Kekumuhan yang diperparah dengan sistem pembuangan sampah secara liar di wilayah pesisir menunjukkan situasi penurunan kualitas lingkungan. Pada kenyataannya, pemeliharaan lingkungan wilayah pesisir pada masa krisis menjadi sangat terabaikan dan seolah-olah sudah tidak menjadi prioritas. Bukan tidak mungkin, setelah masa krisis berlalu, kondisi lingkungan wilayah setempat mungkin sudah sangat buruk dan bahkan mungkin sudah tidak dapat dipulihkan sama sekali.

Sementara diketahui bahwa pada masa krisis ini Pemerintah melakukan suatu upaya pembenahan ekonomi kembali melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat versi JPS adalah penciptaan lapangan kerja produktif. Bantuan program ini diharapkan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, karena JPS dimaksudkan memberi kesempatan kegiatan pembangunan ekonomi dari, oleh dan untuk masyarakat. Di lain pihak, masyarakat terbatas dalam menterjemahkan program bantuan dalam bentuk suatu usulan yang dapat memiliki prospek nilai tambah atau pun menciptakan lapangan kerja. Keterbatasan ini seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh para peneliti dan juga pencinta lingkungan wilayah pesisir untuk turut urun rebug dalam memecahkan masalah guna kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga meningkatkan pemeliharaan lingkungan setempat.

Urun rebug pakar lingkungan, tataruang dan pemerhati lingkungan pesisir dapat dituangkan melalui aspek-aspek mendasar. Sebagai contoh, dilakukan suatu kegiatan identifikasi potensialitas lingkungan alam sekitar pesisir yang cenderung menurun kualitasnya ataupun mengidentifikasi potensi yang justru

belum dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah secara ekonomi. Khusus bagi pakar tata ruang ('spatial analysts') memiliki peran yang sentral dalam mengidentifikasi sebaran wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, dan wilayah-wilayah pengganggu. Dengan melakukan analisis pertampalan, maka dapat diketahui wilayah kantong kemiskinan dan pengangguran yang secara 'emergency' perlu dibantu dalam pemulihan ekonomi. Sesuai dengan kaidah pemberdayaan masyarakat, maka kelompok yang paling lemah harus diutamakan untuk dibantu. Dengan memiliki gambaran terhadap wilayah 'potensi', baik secara ekonomi positif (kaya) maupun ekonomi negatif (miskin), maka dapat dilakukan suatu strata prioritas bagi pemulihan ekonomi wilayah masyarakat pesisir.

Jadi pada dasarnya, pakar dan para pemerhati lingkungan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat tentang bagaimana memanfaatkan bantuan pemerintah sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan yang mungkin dapat ditawarkan adalah dalam bentuk 'community development services'. Setelah ditemukannya potensialitas 'resources' setempat yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dilestarikan, maka dilakukan penjabaran yang nyata bagi 'innovative and appropriate technologies' bagi wilayah pesisir, disertai dengan dorongan motivasi masyarakat untuk berorientasi positif terhadap prospek pembangunan yang layak bagi wilayah setempat. Kombinasi pendekatan seperti ini sangat membantu pemeliharaan lingkungan pesisir.

Pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan kelompok 'facilitator' di tingkat komunitas masyarakat lokal merupakan salah satu kontribusi bagi pembangunan berlanjut di wilayah lingkungan pesisir.

Daftar Acuan

- Abeyasekere, Suzan (1989), History of Jakarta, Oxford Univ. Press, Singapore.
- BAPPENAS, RI. (1998), "Rancangan Bantuan Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi", Pertemuan Bappenas dan Bappeda Tingkat I seluruh Indonesia, 19 September.
- Branch, Melville C. (1995), Perencanaan Kota Komprehensif, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta.
- Koestoer, Raldi H. (1997), Perspektif Lingkungan Desakota: Teori dan Kasus, UI Press, Jakarta.
- Kompas (surat kabar), 5 April 1999, hal. 2
- LOICZ (land Ocean Interactions in the Coastal Zone), newsletter No 9, 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999), "Pemantauan Program Pembangunan Di Era Reformasi", Raker Departemen di Lingkungan Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS, Jakarta, 1 Februari.
- Walmsley, D.J. dan G.J. Lewis (1993), People and Environment, Longman.